Arsip Bacaan Gratis

Bebas seperti udara! Siapapun boleh membaca, menyebarluaskan, dan memanfaatkan semua bacaan di blog ini untuk tujuan apapun.

Minggu, 21 Desember 2025

Jalan Afrika Menuju Anarkisme?

Penulis: Jim Feast

Pengalaman saya dalam perjalanan baru-baru ini ke Gambia, di pesisir barat-tengah Afrika, mengingatkan saya pada impian lama kaum kiri bahwa negara akan “layu dengan sendirinya” setelah kaum pekerja berhasil menggulingkan kapitalisme.

Di sinilah letak ironi sejarah. Dalam lima belas tahun terakhir, di negara-negara dunia yang belum berkembang secara industri, negara memang mulai melemah, tetapi bukan karena berhasil dilampaui oleh sistem baru, melainkan akibat meluasnya kapitalisme global. Ketika berbicara tentang runtuhnya negara di wilayah pinggiran kapitalisme, hal itu bukan berarti pemerintahan benar-benar lenyap sepenuhnya, melainkan bahwa banyak negara telah kehilangan sebagian besar kekuasaannya dan tidak lagi menjadi lembaga pengendali total seperti yang kita lihat di negara-negara maju di belahan dunia utara.

Setelah perjalanan saya pada bulan Februari ke negara yang secara resmi bernama Republik Gambia, negara terkecil di Afrika, muncul sebuah gagasan yang tampak bertentangan dengan intuisi: bahwa runtuhnya negara (secara relatif) mungkin justru menjadi pertanda munculnya arah masa depan yang lebih anti-otoritarian bagi negara-negara pinggiran.

Sebagai perbandingan, mari melihat sejarah terkini Amerika Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Sebagian besar negara di kawasan ini sejak lama terjebak dalam hubungan pertukaran yang tidak setara dengan dunia industri. Mereka menjual bahan mentah dengan harga murah, lalu membeli kembali barang-barang manufaktur dengan harga yang telah dinaikkan jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, mereka terus menanggung beban utang, baik akibat impor tersebut maupun untuk membiayai program-program pemerintah yang sebagian besar korup.

Satu-satunya jalan yang tampak jelas bagi negara-negara tersebut untuk keluar dari ketergantungan adalah dengan mengalihkan keuntungan dari sektor bahan mentah guna membangun industri berat mereka sendiri, yang dilindungi oleh kebijakan tarif perdagangan. Meskipun strategi ini hanya berhasil di beberapa negara, penerapan kebijakan penyesuaian struktural pada dekade 1980-an yang dipaksakan oleh *World Bank* dan *International Monetary Fund (IMF)* demi memenuhi pembayaran utang yang belum terlunasi, pada akhirnya menghentikan penggunaan strategi tersebut. Lembaga-lembaga keuangan Barat sebagai kreditur, dengan imbalan kelanjutan pinjaman, memaksa negara-negara di bawah pengaruh mereka untuk menghentikan program industrialisasi dan kembali memusatkan perhatian pada ekstraksi bahan mentah, sekaligus membongkar hambatan tarif perdagangan agar barang-barang impor dari Barat dapat masuk dengan lebih mudah.

Dampak sosialnya sangat besar. Penutupan pabrik-pabrik menyebabkan PHK massal terhadap para buruh, begitu pula dengan pengurangan pegawai pemerintah. Mereka yang kehilangan mata pencaharian kemudian masuk ke sektor informal perkotaan yang terus membengkak, bersama para petani yang tersingkir akibat penekanan baru pada pertanian kapitalis (yakni pertanian yang padat modal).

Mike Davis dalam *"Planet of Slums"* berpendapat bahwa negara-negara tersebut, yang terjebak dalam urbanisasi tak terkendali dan kemiskinan yang terus memburuk, hampir tidak memiliki harapan untuk keluar dari keterpurukan. Mereka yang menguasai pusat-pusat kekuasaan dapat dengan mudah mempertahankan kekayaan dan kekuasaan mereka karena sebagian besar masyarakat miskin terlalu sibuk berjuang untuk bertahan hidup dari hari ke hari sehingga tidak mampu membangun perlawanan yang terorganisir. Sebaliknya, para penulis dalam antologi *"Another Production Is Possible: Beyond the Capitalist Canon"*, yang disunting oleh Boaventura de Sousa Santos, melihat adanya contoh-contoh perlawanan dari kaum miskin. Menurut para pemikir tersebut, kaum miskin yang menyadari bahwa tatanan dunia baru tidak menyediakan tempat bagi mereka sering kali memilih untuk meninggalkan struktur ekonomi kapitalis atau mengabaikan batasan-batasan hukum yang diberlakukan oleh sistem itu.

Jalur pertama tercermin dalam pembentukan ekonomi solidaritas yang terdiri atas koperasi-koperasi yang dimiliki dan dikelola oleh para pekerja, yang kini menjadi bagian dari perekonomian di banyak negara Amerika Selatan. Bentuk-bentuk organisasi ini, menurut para kontributor *"Another Production Is Possible: Beyond the Capitalist Canon"*, berusaha untuk *“menggantikan otokrasi yang menjadi ciri produksi kapitalis.. dengan demokrasi partisipatif di dalam unit-unit produksi.”* Tujuannya adalah memperluas ruang demokrasi dari ranah politik ke ranah ekonomi.

Cari Yang Anda Mau...

Telusuri

Mengenai Saya

Front Anti-Penindasan Sidoarjo

Lihat profil lengkapku

Arsip Blog

► 2026 (85)

▼ 2025 (8)

▼ Desember (8)

Jalan Afrika Menuju Anarkisme?

Mengapa Setengah dari Anak-Anak di Dunia Tidur dal...

Afrika, Neoliberalisme, dan Anarkisme

Bagaimana Imperialisme dan Elit Pascakolonial Menj...

Amerikanisme yang Dipersonifikasikan: Mengapa Fasi...

Neoliberalisme Otoriter: Hantu Pinochet

Fasisme & Anti-Fasisme: Sebuah Perspektif Dekolonial

ABC Dekolonisasi

Translate

Pilih Bahasa

Diberdayakan oleh Google Terjemahan

Pengabaian terhadap batasan-batasan hukum dapat dilihat dalam gerakan *Movement of Landless Workers* di Brazil, yang aktif sejak akhir dekade 1980-an. Gerakan ini terdiri dari “kaum tani lumpen”, yakni para buruh tani terlantar dan tidak memiliki lahan tetap, yang mengambil alih latifundia atau perkebunan besar yang tidak digunakan, lalu menduduki dan menggarapnya hingga pemerintah akhirnya melegalkan pengambilalihan tersebut. Aksi paling dramatis dari gerakan ini terjadi pada April 1996, ketika 15.000 orang menduduki lahan pertanian di Paraná, dan wilayah itu masih mereka kuasai hingga hari ini.

Jika membandingkan Amerika Selatan dan Afrika dalam hal kemungkinan memimpin perlawanan terhadap kapital global, maka dapat dikatakan bahwa kaum miskin di Amerika Selatan lebih mampu menghadapi represi negara karena memiliki organisasi buruh dan tani yang lebih kuat. Namun Afrika, seperti yang akan kita lihat, dalam beberapa hal tampak lebih siap untuk mengubah runtuhnya negara dan kerusakan yang ditimbulkan oleh ekonomi uang menjadi sesuatu yang lebih positif.

Pertama, sering kali tidak disadari bahwa di Afrika Sub-Sahara, kecuali di sebagian kecil negara yang memiliki populasi pemukim kulit putih dalam jumlah besar dan sumber daya berharga (seperti berlian atau tembaga), penetrasi pertanian kapitalis maupun kekuasaan pemerintah ke wilayah pedalaman sebenarnya sangat terbatas. Pada era kolonial, menurut pengamat Afrika, Alex Thomson, *“kekuatan-kekuatan imperialis hanya memiliki tujuan yang terbatas. Tidak ada keinginan untuk menginvestasikan sumber daya demi memastikan negara mampu memperluas kekuasaannya hingga ke setiap sudut koloni baru.”*

Dan setelah kemerdekaan, kecuali di negara-negara dengan populasi pemukim kulit putih, Goran Hyden dalam *"African Politics in Comparative Perspective"* menyatakan, *“Di tempat lain, masyarakat Afrika tetap hanya sedikit dipengaruhi oleh pasar. Mereka memang semakin sering berdagang di pasar, tetapi dasar kehidupan mereka tetap bertumpu pada rumah tangga dan pertanian keluarga, tempat etos subsisten masih mendominasi.”*

Kedua, hubungan yang terbatas seperti itu justru menguntungkan para penjajah, yang dengan sengaja menciptakan kelas pekerja semi-proletar. Alex Thomson menyatakan, *“Para pemilik tambang dan pengelola perkebunan bergantung pada kenyataan bahwa para petani [yang datang bekerja sementara] juga tetap memproduksi kebutuhan mereka sendiri di lahan kecil milik keluarga mereka (yang dikelola oleh keluarga selama mereka pergi bekerja). Karena para pekerja memiliki sumber penghidupan tambahan ini, upah dapat ditekan tetap rendah.”*

Poin pentingnya adalah sebagai berikut: seberapa pun luas pengaruh kapitalisme global, sebagian besar wilayah Afrika Sub-Sahara belum sepenuhnya dibentuk oleh kekuasaan negara maupun pasar. Selain itu, jika di Amerika Selatan terdapat perjuangan untuk membangun ekonomi alternatif, maka di beberapa wilayah Afrika yang sedang dibahas ini, ekonomi subsisten yang kuat, yang tidak berorientasi pada keuntungan maupun ekspansi modal masih terus bertahan.

Dalam perjalanan kami ke Gambia untuk mengunjungi putri kami, Ana, seorang relawan *Peace Corps*, kami pergi ke pedalaman menuju sebuah desa Fula di North River. Berbekal pengetahuan Ana yang telah tinggal di desa tersebut selama 18 bulan dan mampu berbicara dalam bahasa Fula, kami dapat melihat secara langsung kehidupan dalam budaya subsisten yang tidak bergantung pada ekonomi uang. Kami melihat bahwa meskipun ada orang-orang yang meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di ibu kota, banyak juga yang memilih tetap tinggal di kampung halaman mereka, hidup dalam kondisi subsisten tetapi tetap memiliki banyak waktu untuk menjalankan kegiatan keagamaan dan budaya, termasuk bersosialisasi sambil minum grinty (teh hijau) dan makan kacang tanah.

Kehidupan di sana sangat sederhana. Masyarakat Fula memelihara sapi serta menanam millet dan kacang tanah. Makanan mereka biasanya hanya berupa millet (untuk sarapan dan makan malam) atau nasi (untuk makan siang), yang disajikan dengan saus bercita rasa “sangat pedas”. Susu segar selalu menemani setiap hidangan. Selain itu, hampir tidak ada variasi makanan lain. Mereka makan menggunakan tangan, tanpa alat makan. Pada waktu senggang, mereka menikmati grinty yang diseduh tiga kali, dibuat dalam teko kecil seukuran teko mainan anak-anak dan diminum menggunakan gelas kecil seperti gelas shot. Air untuk mencuci pakaian dan mandi diambil dari sumur, lalu dibawa pulang menggunakan ember. Rumah-rumah mereka dibuat dari tanah liat merah yang dikeringkan, digali dari lubang di sekitar desa, kemudian dibentuk dan dicetak menggunakan rangka kayu. Perabot rumah tangga pun sangat sederhana, biasanya hanya terdiri dari sebuah tempat tidur.

Dalam masyarakat kapitalis, uang yang diperoleh seseorang memang bisa digunakan untuk membantu teman dan keluarga, tetapi sebagian besar biasanya disimpan atau diinvestasikan demi masa depan pribadi si pencari nafkah. Sebaliknya, dalam ekonomi subsisten, seseorang yang memperoleh kekayaan akan mengembalikannya kepada seluruh komunitas, bukan hanya sebagai bentuk konsumsi mencolok, tetapi juga karena adanya keyakinan bahwa keberuntungan tidak terutama lahir dari usaha pribadi, melainkan dari keterlibatan seseorang dalam suatu kolektivitas. Goran Hyden menekankan hal ini dengan mengutip seorang antropolog yang *“menunjukkan bagaimana individu-individu [Afrika] yang baru memperoleh kekayaan menghabiskan banyak uang untuk upacara pribadi seperti pemakaman dan pernikahan guna menunjukkan komitmen mereka terhadap institusi kekerabatan lokal.”*

Penekanan pada tradisi pemberian hadiah seperti itu terlihat jelas di desa yang kami kunjungi. Sebagai hadiah untuk tuan rumah kami, kami membawa satu karung beras seberat 50 kilogram.

Sehari setelah kami tiba, sebuah ritual khusus diadakan untuk mengucap syukur kepada Allah dan membagi beras tersebut kepada tujuh kompleks keluarga yang membentuk komunitas desa itu. Seorang pemuka Muslim setempat terlebih dahulu memimpin doa bersama, sementara kami semua mengulurkan tangan dengan telapak menghadap ke atas sebagai tanda menerima berkah. Setelah itu, beras dibagi rata ke dalam tujuh panci besar. Setelah pembagian selesai, doa kedua kembali dipanjatkan.

Dalam dunia seperti ini, di mana tradisi memberi dan menerima hadiah memiliki peran yang sangat penting, kerja sama (dalam bertani, menggembala, maupun mengambil keputusan) lebih diutamakan daripada individualisme, sesuatu yang cukup jarang ditemukan dalam masyarakat kapitalis. Hal ini terlihat jelas dalam sikap masyarakat Fula terhadap kepemilikan pribadi. Ketika seorang warga desa ingin meminjam sesuatu, misalnya gunting, ia cukup datang ke rumah pemiliknya, meminta izin, lalu meminjamnya. Bahkan jika pemilik rumah sedang tidak ada, orang tersebut tetap dapat mengambil gunting itu. Semua pihak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima.

Keterbukaan semacam ini juga berlaku terhadap tanah. Suatu malam kami melihat seorang warga desa membakar ladang sebagai persiapan untuk menanam. Saya kemudian bertanya kepada seorang pria bernama Immagi (orang-orang yang pernah menempuh pendidikan menengah dapat berbicara bahasa Inggris), mengenai siapa pemilik tanah tersebut? Ia menjawab, *"Tanah itu menjadi miliknya jika ia menggarapnya."* Lalu ia menambahkan, *"Semua tanah bebas digunakan."*

Solidaritas desa terus diperkuat melalui berbagai ritual keramahtamahan, baik dalam pernikahan, kelahiran, maupun saat menerima tamu. Ketika kami tiba pada malam hari, seluruh penghuni kompleks keluarga, mulai dari bayi yang digendong para ibu hingga para tetua yang dihormati, datang ke rumah kami untuk menyambut dan bertanya, *"Bagaimana harimu?"* Keesokan sorenya, kami mengunjungi setiap kompleks keluarga untuk duduk bersama, menghabiskan waktu, dan makan kacang tanah.

Ngomong-ngomong, inilah ciri paling mencolok dari lingkungan yang tidak bergantung pada uang: meluangkan waktu bersama orang lain. Sebagian besar waktu dalam sehari digunakan untuk bersosialisasi. Yang mereka miliki dalam kelimpahan adalah waktu untuk berbincang, berdiskusi, berdebat, bercanda, bernyanyi, mengenang masa lalu, dan bermimpi bersama. Pada saat cuaca paling panas (dengan suhu rata-rata antara 90 hingga 100 derajat sepanjang tahun), maupun pada malam panjang yang sejuk karena hembusan angin, semua orang berkumpul dan menghabiskan waktu bersama.

Di sisi lain, masyarakat Fula tetap bersifat patriarkal, yang terlihat dari kenyataan bahwa perempuan memikul lebih banyak pekerjaan rumah tangga. Hal ini juga umum ditemukan di seluruh kawasan tersebut. Goran Hyden mengutip sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa perempuan menyumbang hampir tiga perempat tenaga kerja dalam produksi pangan. Namun, setidaknya di desa ini, pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya bersifat terasing. Misalnya ketika para perempuan mencuci pakaian atau menumbuk millet, pekerjaan itu dilakukan di ruang terbuka di tengah kompleks keluarga, di bawah pohon dan bersama perempuan-perempuan lain, sambil terus terlibat dalam percakapan yang hidup. Di sana, pekerjaan dan percakapan menyatu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Mari kembali pada pembahasan mengenai budaya kerja masyarakat yang termarginalkan. Mike Davis membayangkan masa depan di mana kaum miskin ekstrem, yang menumpuk di kota-kota megapolitan, bertahan hidup dengan susah payah di pinggiran sistem kapitalis yang perlahan terurai. Namun Boaventura de Sousa Santos dan para penulis lainnya berpendapat bahwa, ketika dihadapkan pada pilihan berupa pemiskinan massal secara menyeluruh, kelompok-kelompok yang tersingkir mulai mencari bentuk-bentuk ekonomi alternatif. Kebangkitan kembali sektor subsisten yang masih bertahan menjadi salah satu alternatif tersebut.

Namun, kita dapat melangkah lebih jauh dengan melihat secara lebih mendalam proses melemahnya negara. Seperti telah disinggung sebelumnya, perubahan ini bukan berarti fungsi-fungsi pemerintahan sepenuhnya dibongkar dan langsung diambil alih oleh lembaga-lembaga demokratis milik kaum miskin. Yang terjadi di Afrika justru merupakan proses devolusi tiga arah yang mencakup: 1) Reorganisasi mendasar struktur negara; 2) Melemahnya kemampuan pemerintah untuk memerintah; dan 3) Hilangnya kedaulatan negara.

1. Sejak kemerdekaan, sebagian besar negara di Afrika Sub-Sahara merupakan negara satu partai yang dipimpin oleh orang-orang kuat yang korup, yang mempertahankan kekuasaan melalui kombinasi paksaan militer dan pembagian keuntungan kepada para pendukung dekat mereka. Dalam kajiannya mengenai sistem politik Afrika, Goran Hyden menjelaskan bahwa, seperti halnya sistem politik lainnya, negara satu partai yang paling stabil lebih bergantung pada jaringan klien pendukung daripada kekerasan semata. Penguasa yang cerdik memahami bahwa bukan hanya kroni terdekatnya (yang mengisi struktur negara), tetapi juga para pemimpin regional dan kesukuan dari berbagai kelompok penting harus dipelihara melalui pendanaan proyek-proyek infrastruktur (yang sekaligus membuka peluang besar untuk korupsi) di wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Dari sini terbentuk semacam demokrasi praktis, meskipun hanya berlaku di antara faksi-faksi elite.

Namun, ketika kebijakan penyesuaian struktural dipaksakan kepada negara-negara tersebut, bentuk pemerintahan semacam ini mulai runtuh karena dana untuk mempertahankan jaringan patronase tidak lagi tersedia. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan elite, banyak negara kemudian beralih ke sistem demokrasi multipartai. Dari tahun 1988 hingga 1999, jumlah negara di Afrika Sub-Sahara

yang menyelenggarakan pemilu multipartai meningkat dari 9 menjadi 45 negara. Perubahan ini untuk sementara waktu, dan secara sinis, menyelesaikan dua persoalan bagi kekuasaan negara. Pertama, sistem tersebut kembali memperoleh semacam legitimasi, meskipun negara tidak lagi mampu menyediakan patronase ataupun layanan kesejahteraan (lihat penjelasan di bawah) bagi warganya. Kedua, sistem itu diperkuat kembali dengan membagi para klien ke dalam partai-partai yang saling bersaing, sehingga setiap kelompok politik hanya perlu menyalurkan dana yang lebih sedikit karena mereka melayani basis pendukung yang lebih kecil.

2. Bentuk lain dari melemahnya kekuasaan negara adalah ketidakmampuannya menyediakan layanan kesejahteraan minimum bagi masyarakat, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, yang dalam program penyesuaian struktural dianggap terlalu mahal sehingga harus dihapus. Meskipun sebagian layanan tersebut kemudian diambil alih oleh organisasi bantuan internasional, sebagian besar layanan yang masih bertahan justru dijalankan oleh kelompok-kelompok dari masyarakat yang sedang mengalami krisis itu sendiri. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan Alex Thomson, *"Menurunnya kapasitas negara menuntut masyarakat sipil untuk meningkatkan kemandiriannya."* Kelompok-kelompok perempuan, serikat buruh, asosiasi petani, dan berbagai jaringan akar rumput lain yang sebelumnya ditekan kini mulai mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Untuk menggambarkan hal ini dengan lebih jelas, saya akan kembali merujuk pada desa Fula. Di desa tempat kami tinggal, terdapat sebuah kelompok perempuan yang terdiri dari perempuan dari seluruh "tujuh kompleks keluarga", yang membentuk organisasi untuk menjual susu fermentasi ("soured" milk, semacam yogurt). Mereka membawanya dengan taksi ke Banjul dan menjualnya di gedung-gedung perkantoran. Idealnya, ketika pemerintah semakin tidak mampu menyediakan layanan bagi masyarakat, kelompok seperti perkumpulan perempuan ini bukan hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai penghubung antara desa dan kota, sehingga dapat tampil sebagai pembangun jaringan sosial yang lebih demokratis.

3. Negara, yang pada masa awal kemerdekaan masih mampu menentukan kebijakan ekonominya sendiri, kini telah kehilangan bagian penting dari kedaulatannya karena harus tunduk pada diktat lembaga-lembaga keuangan internasional. Namun demikian, kemiskinan yang sangat dalam di Afrika Sub-Sahara juga berarti bahwa pengetatan ekonomi yang dipaksakan kepada negara-negara di kawasan ini tidak akan sebesar yang terjadi di Amerika Selatan. Sebagai contoh, pada dekade 1990-an, Brazil dan Argentina mengalami proletarisasi besar-besaran terhadap kelas menengah mereka, sedangkan di banyak negara Afrika bahkan tidak terdapat kelas menengah dalam jumlah besar yang dapat "diperkecil". Selain itu, banyak negara Afrika (seperti Gambia) juga tidak memiliki infrastruktur maupun sumber daya alam bernilai tinggi yang membuat mereka sangat menarik bagi para pemangsa kapital internasional.

Julius Nyerere, presiden pertama Tanzania setelah kemerdekaan, pernah menyerukan sebuah *"Jalan Afrika Menuju Sosialisme"*, di mana negaranya akan kembali pada struktur komunal kehidupan desa tanpa harus terlebih dahulu melewati kapitalisme. Harapan itu memang tidak pernah terwujud, tetapi mungkin saja kini sebuah bentuk struktur sosial yang berbeda sedang mulai tampak di cakrawala.

Sejarah umum Eropa Barat biasanya menggambarkan peralihan dari negara feodal menuju negara demokratis, yang pada saat yang sama menjadi lebih representatif sekaligus memperluas jangkauan kekuasaannya ke dalam masyarakat. Sebaliknya, perubahan yang terjadi di Afrika justru bergerak dari kediktatoran menuju demokrasi yang lebih representatif, bersamaan dengan semakin melemahnya kekuasaan negara atas masyarakat.

Jadi, bagaimana jika muncul sebuah *"Jalan Afrika Menuju Anarkisme"*, di mana ekonomi uang dan negara, yang sedang berada dalam kondisi runtuh atau mundur sebagian, perlahan menyerahkan semakin banyak fungsi sosial kepada komunitas-komunitas desa yang tidak bergantung pada uang maupun negara, dan disusun berdasarkan prinsip mutual aid? Jika tidak, maka yang tersisa hanyalah gambaran suram Mike Davis tentang *"Planet of Slums"* (planet kumuh) atau bahkan situasi yang lebih buruk: dunia yang menyerupai Somalia atau Iraq secara menyeluruh.

Diterjemahkan dari:
https://theanarchistlibrary.org/library/jim-feast-the-african-road-to-anarchism

Diposting oleh Front Anti-Penindasan Sidoarjo

Posting Lebih Baru Beranda Posting Lama

Tema PT Keren Sekali. Diberdayakan oleh Blogger.